

**ANALISIS PENGARUH PANJANG JALAN, PDRB, JUMLAH INDUSTRI
DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH
JAWA TENGAH TAHUN 2014 - 2021**

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Methylene Alya Rifka Shafira
Nomor Mahasiswa : 19313308
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

2022

JUDUL

Analisis Pengaruh Panjang Jalan, PDRB, Jumlah Industri dan Jumlah Penduduk
Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Jawa Tengah Tahun 2014 - 2021

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar sarjana jenjang Strata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan
Pada fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Methylene Alya Rifka Shafira
Nomor Mahasiswa : 19313308
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini ditulis secara sadar dan sungguh-sungguh. Pada penulisan skripsi ini tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan plagiasi. Penulisan skripsi ini sudah sesuai pada buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Indonesia. Apabila pada kemudian hari bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang ditetapkan

Yogyakarta, 14 September 2023

A 1000 Rupiah postage stamp from Indonesia, featuring a portrait of a man and the text '1000', 'REPUBLIK INDONESIA', and 'METERAI TEMPEL'. The stamp is partially obscured by a large, stylized black signature.

Methylene Alya Rifka Shafira

PENGESAHAN

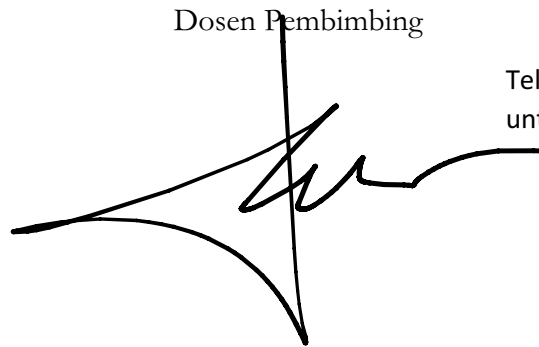
Analisis Pengaruh Panjang Jalan, PDRB, Jumlah Industri dan Jumlah Penduduk
Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Jawa Tengah Tahun 2014 – 2021

Nama : Methylene Alya Rifka Shafira
Nomor Mahasiswa : 19313308
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, September 2023

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Awan Setya Dewanta', written over a vertical line that serves as a separator between the title and the signature.

Telah disetujui
untuk diujikan

Drs. Awan Setya Dewanta, M.Ec.Dev.



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Universitas Islam Indonesia
Condong Catur Depok Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 885376
F. (0274) 882589
E. fbe@uii.ac.id
W. fbe.uii.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada Semester Ganjil 2023/2024, hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir/Skripsi yang disusun oleh:

Nama : METHYLENE ALYA RIFKA SHAFIRA
NIM : 19313308
Judul Tugas Akhir : Analisis Pengaruh Panjang Jalan, PDRB, Jumlah Industri dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Jawa Tengah Tahun 2014 â€” 2021
Dosen Pembimbing : Drs. Awan Setya Dewanta, M.Ec.Dev.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir (Skripsi) tersebut dinyatakan:

Lulus

Nilai : A
Referensi : Layak ditampilkan di Perpustakaan

Tim Penguji:

Ketua Tim : Drs. Awan Setya Dewanta, M.Ec.Dev.

Anggota Tim : Prof. Dr. Drs. Nur Feriyanto, M.Si

Yogyakarta, 17 Oktober 2023
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan,

Abdul Hakim, SE, M.Ec., Ph.D.
NIK: 963130101

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

uh Panjang Jalan, PDRB, Jumlah Industri dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Jawa Tengah Tahu

Disusun oleh : METHYLENE ALYA RIFKA SHAFIRA

Nomor Mahasiswa : 19313308

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Selasa, 17 Oktober 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Drs. Awan Setya Dewanta, M.Ec.Dev.

Penguji : Prof. Dr. Drs. Nur Feriyanto, M.Si



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia
* YOGYAKARTA *
Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat serta kemudahan. Skripsi ini saya persembahkan khusus untuk :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Eko Supriyanto dan Ibu Handayani yang telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang hingga saya mampu menyelesaikan studi saya. Adik saya Najib Izza Rifda Hawaari yang saya cintai. Dukungan dari keluarga yang membuat penulis kuat serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat kelulusan pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
2. Para sahabat saya selama kuliah di kampus FBE UII, terimakasih atas bantuan serta pengalaman yang mengesankan selama kuliah di Jogja.

MOTTO

“Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5 -6)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa”

(Ridwan Kamil)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatub

Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat, pertolongan serta rahmat-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Panjang Jalan, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Industri dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Jawa Tengah Tahun 2014 – 2021”. Dalam proses penyusunan skripsi ini banyak pihak yang terlibat dalam memberikan dukungan serta bantuan. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku rektor institusi Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Johan Arifin., S.E., M.Si., Ph.D selaku pimpinan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Abdul Hakim., S.E., M.Ec., Ph.D selaku ketua prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Drs. Awan Setya Dewanta, M.Ec.Dev. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan pada penyusunan skripsi.
5. Dosen pengajar serta karyawan pada lingkungan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak, Ibu, Najib yang senantiasa memberikan dukungan melalui doa serta kasih sayang sehingga saya mampu melewati semua ini.
7. Om, Bulik, Raya, Aqila yang senantiasa memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini
8. Kepada diri saya sendiri, terimakasih sudah kuat untuk berjuang sejauh ini.
9. Kepada teman teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah memberikan dukungan pada pengerjaan skripsi ini.

Penulis sadar akan kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Sekian yang dapat penulis sampaikan.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatub

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	6
2.1 Tinjauan Pustaka.....	6
2.2 Landasan Teori.....	16
2.2.1 Pajak.....	16
2.2.2 Pajak Daerah.....	18
2.2.2 Produk Domestik Regional Bruto.....	19
2.2.3 Infrastruktur Jalan.....	20
2.2.4 Industri.....	21
2.2.5 Jumlah Penduduk.....	22
2.2.6 Hubungan Panjang Jalan Dengan Penerimaan Pajak Daerah.....	23

2.2.7 Hubungan Produk Domestik Regional Bruto Dengan Penerimaan Pajak Daerah.....	24
2.2.8 Hubungan Jumlah Industri Dengan Penerimaan Pajak Daerah.....	24
2.2.9 Hubungan Jumlah Penduduk Dengan Penerimaan Pajak Daerah.....	25
2.3 Kerangka Pemikiran.....	25
2.4 Hipotesis	26
BAB III.....	21
METODOLOGI PENELITIAN	21
3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data.....	21
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	21
3.2.1 Variabel Dependen (Variabel Terikat).....	21
3.2.2 Variabel Independen (Variabel Bebas).....	22
3.3 Metode Analisis Data	22
3.3.1 Uji Model	23
3.3.1.1 Estimasi Model pada Data Panel.....	23
3.3.1.2 Pemilihan Model Data Panel.....	24
3.4 Pengujian Hipotesis	26
3.4.1 Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)	26
3.4.2 Koefisien Regresi Bersama-sama (Uji F).....	26
3.4.3 Koefisien Regresi Parsial (Uji T)	26
BAB IV.....	27
HASIL ANALISIS	27
4.1 Analisis Deskriptif Data	27
4.2 Regresi Data Panel	27
4.3 Pemilihan Model	28
4.3.1 Uji Chow	28
4.3.2 Uji Hausmant.....	28
4.3.3 Uji LM	29
4.4 Model Regresi Terbaik	29
4.4.3 Koefisien Determinasi (R^2).....	30

4.4.4	Uji Analisis F statistik.....	31
4.4.5	Uji Analisis T statistik	31
4.5	Analisis Ekonomi	33
4.5.3	Analisis Pengaruh Panjang Jalan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah.....	33
4.5.4	Analisis Pengaruh PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah.....	33
4.5.5	Analisis Pengaruh Jumlah Industri Terhadap Penerimaan Pajak Daerah.	34
4.5.6	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah	34
BAB V		34
KESIMPULAN DAN SARAN		34
5.1	Kesimpulan	34
5.2	Saran	34
DAFTAR PUSTAKA		36
LAMPIRAN		39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran.....	19
-------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia.....	2
Tabel 1. 2 Realisasi Penerimaan Pajak Jawa Tengah Terhadap Seluruh Provinsi di Pulau Jawa ...	3
Tabel 2. 1 Perbedaan Penelitian Terdahulu	9
Tabel 2. 2 Klasifikasi Industri	22
Tabel 4. 1 Deskriptif Data Penelitian	27
Tabel 4. 2 Hasil Uji Chow	28
Tabel 4. 3 Hasil Uji Hausmant.....	29
Tabel 4. 4 Hasil Uji LM.....	29
Tabel 4. 5 Hasil Uji Fixed Effect Model	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Hasil Pengujian.....	39
------------------------------------	----

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu pemasukan atau pendapatan akan suatu negara maupun daerah. Pajak digunakan dalam membiayai kegiatan pemerintahan bahkan pembangunan nasional atau daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber pada Badan Pusat Statistika. Perbedaan akan besar nilai pendapatan pajak daerah merupakan faktor pada penelitian ini. Pajak daerah dapat diperoleh dari beberapa jenis pajak. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mempengaruhi Panjang Jalan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Industri dan Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 – 2021.

Kata kunci : Pajak Daerah, Panjang Jalan, PDRB, Jumlah Industri dan Jumlah Penduduk

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang besar bagi suatu negara atau daerah. Berdasarkan peraturan pada Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak memiliki arti kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan pada Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak juga merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan akan suatu negara maupun daerah.

Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya dibagi menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan jenis pajak yang sistem pemungutannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak. Hasil akan pemungutan pajak tersebut dimasukkan dalam bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (S et al., 2009). Pajak daerah merupakan jenis pajak yang sistem pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Hasil pajak daerah yang dikalkulasikan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang akan digunakan sebagai salah satu pembiayaan akan pengeluaran suatu daerah.

Indonesia sudah menetapkan adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang perpajakan. Sebagai negara Indonesia semestinya perlu melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan. Masyarakat sebagai wajib pajak harus melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak yang diperlukan sebagai pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tidak hanya masyarakat saja tetapi lembaga negara yang mengatur perpajakan juga perlu melaksanakan tugasnya dalam memberikan pembinaan, pelayanan serta pengawasan akan pemenuhan kewajiban perpajakan. Selarasnya dengan perilaku akan masyarakat serta pemerintah dalam melaksanakan tugasnya akan memiliki

dampak perpajakan berjalan dengan lancar.

Indonesia memiliki permasalahan dalam penerimaan pajak yang tidak maksimal. Penyebab dari penerimaan akan pajak yang tidak maksimal tersebut adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak yang masih rendah. Menurut Kepala Badan Fiskal Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa basis pajakk yang tidak berkembang bahkan tidak bertambah merupakan masalah dari penerimaan pajak. Padahal hal tersebut sudah diatur dalam perundang-undangan pemerintah Indonesia tetapi masyarakat terlalu menyepelekan. Dalam mengatasi hal ini pemerintah perlu mengkaji ulang supaya dapat berjalan dengan selaras.

Rendahnya kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak mempengaruhi raiso pajak di Indonesia. Tahun 2021, tax ratio Indonesia berada pada angka 10,1%. Angka tersebut menurut OECD menjadi salah satu yang terendah di antara negara Asia Pasifik. Dilihat dari wilayah Indonesia yang sangat luas serta penduduk yang banyak seharusnya angka rasio pajak dapat mencapai angka yang tinggi apabila pembayaran pajak mampu dilakukan secara optimal.

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak (%)
2016	83,4%
2017	91,73%
2018	93,86%
2019	86,55%
2020	91,50%
2021	107,15%

Sumber : Badan Pusat Statistika (2021)

Tabel diatas menunjukkan realisasi penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2016 – 2021 dalam persentase. Tahun 2016 hingga 2018 realisasi penerimaan pajak Indonesia mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan. Pada tahun

selanjutnya realisasi penerimaan pajak Indonesia mengalami peningkatan kembali. Pada tahun 2020 memiliki kemampuan untuk meningkatkan kembali persentase realisasi penerimaan pajak.

Menurut Kementerian Keuangan pada tahun 2016, Pulau Jawa Menjadi penyumbang penerimaan pajak terbesar di Indonesia sebesar 78%. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang memiliki banyak potensi dalam menunjang peningkatan perpajakan. Dilihat dari lokasi geografi tersebut, Provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan sebagai wilayah yang strategis. Dengan lokasi geografi yang strategis merupakan keuntungan untuk Provinsi Jawa Tengah dalam menyelenggarakan pemerintahannya.

Tabel 1. 2 Realisasi Penerimaan Pajak Jawa Tengah Terhadap Seluruh Provinsi di Pulau Jawa

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak (%)
2018	12,78%
2019	12,46%
2020	13,61%
2021	13,18%
2022	13,61%

Sumber : Badan Pusat Statistika

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat realisasi penerimaan pajak Jawa Tengah terhadap seluruh provinsi di pulau jawa pada tahun 2018 dan 2019 sebesar 12% dan 2020 hingga 2022 sebesar 13%. Angka dapat dikatakan rasio yang kecil dibanding dengan provinsi yang lain di Pulau Jawa. Akan tetapi angka tersebut bukanlah angka yang paling rendah dibandingkan dengan Provinsi yang lain. Kesimpulannya adalah Provinsi Jawa Tengah mampu dalam mengolah sumber daya yang ada untuk menunjang peningkatan penerimaan pajak daerah.

Menurut Badan Pusat Statistika upaya peningkatan penerimaan pajak berdasarkan sumber dan lapangan usaha Jawa Tengah terdapat 2 sektor yang mendominasi yaitu industri pengolahan dan konstruksi. Industri Pengolahan berkaitan dengan adanya industri yang bergerak pada daerah Jawa Tengah. Jumlah Industri yang ada juga memiliki hubungan dengan tenaga kerja yang ada. Jumlah industri serta jumlah tenaga kerja yang meningkat akan meningkatkan penerimaan pajak berdasarkan sumber dan lapangan usaha Provinsi Jawa Tengah.

Sektor konstruksi berkaitan dengan pembangunan jalan. Pembangunan jalan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memudahkan akses perpindahan masyarakat dengan adanya kemudahan tersebut masyarakat dapat menggunakannya seoptimal mungkin untuk menunjang peningkatan penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah.

Upaya Peningkatan penerimaan pajak Provinsi Jawa Tengah juga berguna untuk peningkatan hasil produkdi Menurut Badan Pusat Statistika pada tahun 2021, dalam PDRB Jawa Tengah sektor industri manufaktur merupakan penyumbang terbesar yaitu sebesar 34,31%. Apabila penerimaan pajak mengalami peningkatan dapat digunakan untuk menunjang peningkatan hasil produksi. Hal tersebut mampu dijadikan sebagai modal dalam meningkatkan pajak daerah.

Tidak hanya memikirkan tentang potensi yang ada untuk dioptimalkan itu saja tetapi infrastruktur jalan juga merupakan satu satu faktor yang penting. Pemerintah daerah memiliki upaya untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang ada. Infrastruktur jalan digunakan sebagai sarana dalam pelaksanaan perekonomian. Semakin baik akan infrastruktur jalan akan semakin baik pula kegiatan perekonomian karena adanya kemudahan akses jalan.

Beberapa upaya terus dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah. Upaya yang dilakukan nampaknya memang belum bisa menghasilkan nilai pendapatan pajak daerah dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Jawa. Perlu adanya evaluasi pada pemerintah daerah Provinsi Jawa

Tengah terkait dengan pemungutan pajak. Hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian penerimaan pajak daerah pada Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul : **“Analisis Pengaruh Panjang Jalan, PDRB, Jumlah Industri dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2021”**.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh panjang jalan menurut panjang jalan terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh jumlah industri terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah?
4. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh panjang jalan menurut panjang jalan terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah industri terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah
4. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
Untuk mengetahui pembangunan panjang jalan pada suatu daerah yang menunjang ekonomi suatu daerah serta mengetahui pengaruhnya terhadap

penerimaan pajak suatu daerah dan sebagai salah satu ilmu yang dapat dipelajari diluar perkuliahan.

2. Bagi Masyarakat

Untuk mengetahui informasi mengenai hubungan antara panjang, PDRB, jumlah industri dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah.

3. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Untuk memberikan informasi terhadap pemerintah daerah atas seberapa besar pengaruh panjang jalan, PDRB, jumlah industri dan juga jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah sehingga dapat dijadikan salah satu patokan dalam membuat peraturan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian Rofiah dan Khusaini, (2017) memiliki tujuan untuk menganalisis adanya pengaruh variabel dependen PDRB, jumlah penduduk, jumlah industri terhadap variabel independen penerimaan pajak reklame pada periode tahun 2006-2015 (Studi Pada Malang Raya). Penelitian yang dilakukan menggunakan data panel dengan data *time series* kurun waktu 2006-2015 dan data *cross-section* yaitu Malang Raya yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Penelitian ini menggunakan model estimasi regresi linier berganda dengan metode panel. Hasil dari penelitian ini adalah variabel independen PDRB serta jumlah industri berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen penerimaan pajak reklame di Malang Raya. Variabel independen jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen penerimaan pajak reklame di Malang Raya.

Penelitian Fatah, (2015) mengetahui pengaruh antara variabel independen jumlah penduduk dan jumlah industri terhadap penerimaan pajak reklame dan efeknya terhadap penerimaan pajak daerah. Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Malang dan Dinas Pendapatan Kota Malang pada periode tahun 2000-2013. Penelitian ini memakai model analisis jalur atau *path analysis*. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah variabel independen jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen penerimaan pajak reklame, sedangkan variabel independen jumlah industri berpengaruh negatif terhadap variabel dependen penerimaan pajak reklame. Variabel penerimaan pajak reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Penelitian Miftahol dkk, (2018) bertujuan untuk memahami analisis pengaruh antara variabel independen jumlah penduduk, jumlah industri besar dan menengah dan PDRB terhadap variabel dependen penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sumenep pada tahun 2006 – 2011. Penelitian ini menggunakan data *time series* kuartal kurun waktu tahun 2006

sampai 2011. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier dengan validitas asumsi klasik. Hasil penelitian menjelaskan bahwa variabel independen jumlah penduduk serta jumlah industri besar dan sedang berpengaruh negatif terhadap variabel dependen penerimaan pajak daerah Sumenep. Variabel independen PDRB memiliki pengaruh positif terhadap variabel dependen penerimaan pajak daerah Sumenep. Secara simultan dengan perhitungan Uji T maka variabel X3, X2, X1 berpengaruh signifikan terhadap Pajak Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep.

Penelitian Andriany dan Mariatul, (2019) menganalisis hubungan antara variabel independen infrastruktur jalan dengan belanja infrastruktur dan variabel dependen *tax capacity* di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data pada 34 provinsi pada tahun 2011-2016. Hasil penelitian menyimpulkan terdapat hubungan positif antara variabel independent belanja infrastruktur dengan variabel dependen *tax capacity* pajak pusat maupun daerah. Variabel independen ketersediaan infrastruktur memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel dependen *tax capacity* pajak daerah. Variabel independen tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat secara signifikan berpengaruh positif terhadap variabel dependen *tax capacity* pajak pusat serta daerah.

Penelitian Hidayah dkk, (2018) menganalisis adanya hubungan sebab akibat atau kausalitas antara pertumbuhan ekonomi, penerimaan pajak dan infrastruktur pada Provinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan merupakan data *time series* dari tahun 1986 – 2016 dengan metode Kausalitas Granger. Penelitian ini menghasilkan tidak terdapat pengaruh kausalitas antara PDRB terhadap pajak dan sebaliknya. Penelitian ini juga menghasilkan tidak adanya pengaruh antara PDRB dan Infrastruktur tetapi terdapat hubungan searah dengan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Iskandar dkk, (2021) memiliki tujuan untuk melihat hubungan sebab akibat antara infrastruktur, pajak dan PDRB per kapita. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan variabel infrastruktur, pajak dan PDRB per kapita. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data *time series* periode tahun 2006 – 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, infrastruktur, pajak dan PDRB per kapita

tidak memiliki kausalitas, namun terdapat hubungan satu arah yaitu pajak mempengaruhi infrastruktur. Kedua, uji kointegrasi menunjukkan tidak terdapat kointegrasi. Ketiga, menunjukkan variabel yang paling berpengaruh infrastruktur dan pajak adalah PDRB per kapita, sedangkan variabel yang paling mempengaruhi infrastruktur adalah PDRB perkapita. Keempat, berdasarkan hasil uji kausalitas Granger dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan pajak yang fluktuatif berdampak langsung terhadap perbaikan perbaikan infrastruktur.

Penelitian Efitriana dan Khorudin, (2021) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame pada daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2019. Penelitian ini menggunakan data panel yaitu gabungan antara data time series dan data cross section pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2012-2019. Penelitian menguji pengaruh variabel independen pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, jumlah industri, jumlah wisatawan luar DIY dan panjang jalan terhadap variabel dependen penerimaan pajak reklame pada 5 Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa variabel independen pertumbuhan ekonomi, jumlah industri dan panjang jalan mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap variabel dependen penerimaan pajak reklame Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan variabel independen jumlah penduduk dan jumlah wisatawan luar DIY tidak berpengaruh terhadap variabel dependen penerimaan pajak reklame Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian Ng dkk, (2019) menganalisis kontribusi variabel bebas pembangunan infrastruktur jalan dan faktor sosial ekonomi yang berkontribusi terhadap variabel terikat pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier panel model *fixed effect* dengan data pada 60 negara pada waktu 3 dekade pada tahun 1980 – 2010. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen pertumbuhan panjang jalan per seribu penduduk, ekspor per kapita, belanja pendidikan per kapita dan persediaan modal fisik per pekerja memberikan kontribusi atau pengaruh positif terhadap variabel

dependen pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Lumy dkk, (2018) menganalisis hubungan variabel independent jumlah penduduk, PDRB dan inflasi terhadap variabel dependen penerimaan pajak daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian disimpulkan bahwa variabel independen jumlah penduduk dan inflasi berpengaruh positif serta signifikan terhadap variabel dependen penerimaan pajak daerah Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya variabel independen PDRB berpengaruh positif terhadap variabel dependen penerimaan pajak daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Penelitian Aji dan Sbm, (2021) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pajak daerah Kota Semarang dengan variabel independent PDRB, inflasi, jumlah industri dan kepadatan penduduk. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan menggunakan model analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel independen PDRB dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan variabel independen jumlah industri dan kepadatan penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan.

Tabel 2. 1 Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Keterangan	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Industri dan PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sumenep Tahun 2006 – 2011 (Miftahol et al., 2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penduduk dan jumlah industri besar dan sedang berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah. - PDRB berpengaruh positif terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> - Objek penelitian : Kabupaten Sumenep - Tahun penelitian : 2006 – 2011

		penerimaan pajak daerah.	
2.	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Lumy et al., 2018)	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penduduk dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah - PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel Independen : Inflasi - Objek Penelitian : Provinsi Sulawesi Utara
3.	Analisis Penerimaan Pajak di DIY dan Faktor yang Mempengaruhinya (Efitriana & Khoirudin, 2021)	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, jumlah industri dan panjang jalan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak reklame. - Jumlah penduduk dan jumlah wisatawan luar DIY tidak 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel independen: Inflasi dan pengangguran. - Tahun penelitian : 2011-2016 - Objek Penelitian : DIY

		berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame.	
4.	Kontribusi Variabel Bebas Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Faktor Sosial Ekonomi yang Berkontribusi Terhadap Variabel Terikat Pertumbuhan Ekonomi (Ng et al., 2019)	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel independen pertumbuhan panjang jalan per seribu penduduk, ekspor per kapita, belanja pendidikan per kapita dan persediaan modal fisik per pekerja berpengaruh positif terhadap variabel dependen pertumbuhan ekonomi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel Independen : ekspor, persediaan modal
5.	Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Pajak daerah Kota Semarang Dengan Variabel Independen PDRB, Inflasi, Jumlah Industri dan Kepadatan	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel independen PDRB dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan - Variabel independen jumlah industri dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel Independen : Inflasi - Objek Penelitian : Kota Semarang

	Penduduk. (Aji & Sbm, 2021)	kepadatan penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan.	
6.	Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame pada Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2019. (Efitriana & Khoirudin, 2021)	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel independen pertumbuhan ekonomi, jumlah industri dan panjang jalan mempengaruhi secara positif dan signifikan terhadap variabel dependen penerimaan pajak reklame Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta - Variabel independen jumlah penduduk dan jumlah wisatawan luar DIY tidak berpengaruh terhadap variabel dependen penerimaan pajak reklame Provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel Independen : Jumlah Wisatawan Luar DIY - Variabel Dependen : Pajak Reklame - Objek Penelitian : Daerah Istimewa Yogyakarta

		Daerah Istimewa Yogyakarta.	
7.	<p>Hubungan Sebab Akibat antara Infrastruktur, Pajak dan PDRB per Kapita.</p> <p>(Iskandar et al., 2021)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat hubungan satu arah yaitu pajak mempengaruhi infrastruktur. - Variabel yang paling berpengaruh infrastruktur dan pajak adalah PDRB per kapita, sedangkan variabel yang paling mempengaruhi infrastruktur adalah PDRB perkapita. - hasil uji kausalitas Granger menyimpulkan bahwa pertumbuhan pajak yang fluktuatif berdampak langsung terhadap perbaikan perbaikan infrastruktur. 	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis Penelitian : Hubungan Sebab Akibat

8.	<p>Pengaruh antara Variabel Independen Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri Terhadap Penerimaan Pajak Reklame dan Efeknya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah. (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Periode Tahun 2000-2013) (Fatah, 2015)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel penerimaan pajak reklame, - Variabel jumlah industri berpengaruh negatif terhadap variabel penerimaan pajak reklame. - Variabel penerimaan pajak reklame berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel Dependen : Pajak Reklame - Objek Penelitian : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang
9.	<p>Analisis Hubungan Antara Variabel Independen Infrastruktur Jalan dengan Belanja</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel belanja infrastruktur berhubungan positif dengan variabel <i>tax capacity</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel Independen : Belanja Infrastruktur

	<p>Infrastruktur dan Variabel Dependen <i>Tax Capacity</i> di Indonesia. (Andriany & Mariatul, 2019)</p>	<p>pajak pusat maupun daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Variabel ketersediaan infrastruktur memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel <i>tax capacity</i> pajak daerah. - Variabel tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat secara signifikan berpengaruh positif terhadap variabel <i>tax capacity</i> pajak pusat serta daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel Dependen : <i>Tax Capacity</i>
10.	<p>Analisis Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi, Infrastruktur dan Penerimaan Pajak di Provinsi Sumatera Barat. (Hidayah et al., 2018)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat pengaruh kausalitas antara PDRB terhadap pajak dan sebaliknya. - Tidak adanya pengaruh antara PDRB dan Infrastruktur tetapi 	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis Penelitian : Kausalitas - Objek Penelitian : Provinsi Sumatera Barat

		terdapat hubungan searah dengan pertumbuhan ekonomi.	
--	--	--	--

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel independen dan variabel dependen yang sama dengan penelitian ini. Pada penelitian ini, penulis menggunakan variabel independen panjang jalan, PDRB, jumlah industri dan jumlah penduduk. Sementara pada variabel dependen, penulis menggunakan variabel penerimaan pajak daerah. Perbedaan akan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini digunakan untuk menganalisis faktor faktor pengaruh antar variabel independent terhadap variabel independen karena terdapat perbedaan atau *gap* antar penerimaan pajak daerah pada Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pajak

Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 pengertian pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan (wajib pajak) yang bersifat memaksa dengan berdasarkan Undang-Undang. Wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengertian pajak menyimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Wajib pajak yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan seperti pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang memiliki kewenangan atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi negara. Pajak digunakan untuk menunjang pembangunan negara dan juga masyarakat. Pajak memiliki beberapa fungsi diantaranya :

1) Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi Anggaran pajak adalah pajak digunakan sebagai sumber dana bagi pemerintah dalam membiayai pengeluaran pemerintah.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi Mengatur pajak adalah pajak berperan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan pemerintah pada bidang sosial ekonomi.

3) Stabilitas

Stabilitas pajak adalah pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berfungsi untuk menjalankan kebijakan pemerintah.

4) Redistribusi Pendapatan

Redistribusi pendapatan adalah pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara digunakan untuk membiayai pengeluaran negara serta pembangunan nasional yang akan memiliki dampak positif dalam segala aspek salah satunya membuka kesempatan kerja yang akan menunjang peningkatan pendapatan masyarakat.

Pajak juga memiliki beberapa jenis berdasarkan badan atau lembaga pemungut pajak dan menurut sifatnya. Jenis pajak berdasarkan badan pemungut pajak dibagi menjadi dua :

1) Pajak Pusat merupakan pajak yang dipungut oleh badan negara atau pemerintah pusat. Pajak pusat mayoritas dikelola oleh badan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan. Pajak pusat yang dikelola meliputi :

- a. Pajak Penghasilan (PPh)
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- d. Bea Meterai
- e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertentu

2.2.2 Pajak Daerah

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjelaskan pengertian pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan atau dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah diperuntukkan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. Pajak daerah dibagi menjadi 2 jenis pajak yaitu jenis pajak Provinsi dan jenis pajak Kabupaten/Kota.

Jenis Pajak Provinsi terdapat beberapa macam :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak Rokok

Jenis pajak Kabupaten/Kota terbagi atas :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pemerintahan Indonesia memberlakukan sistem otonomi daerah yang dimana pemerintah daerah diharuskan untuk mengelola pemerintahannya sendiri salah satunya adalah mengelola berbagai sumber penerimaan pajak pada daerah. Terdapat beberapa upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah menurut Soemitro dalam Aprili et al (2019) yaitu :

- 1) Intensifikasi Pajak yaitu peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu subjek dan objek pajak yang potensial namun belum terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada. Beberapa cara dapat dilakukan dalam upaya intensifikasi pajak yaitu penyempurnaan administrasi pajak, peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut pajak dan penyempurnaan Undang-Undang Pajak.
- 2) Ekstensifikasi Pajak yaitu upaya memperluas subjek dan objek pajak juga penyesuaian tarif. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan dalam upaya ekstensifikasi yaitu perluasan wajib pajak, penyempurnaan tarif dan perluasan objek pajak.

2.2.2 Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Sukirno (2019) pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan dari kondisi perekonomian yang terjadi pada suatu negara secara berkesinambungan atau terus menerus untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka atau kurun waktu tertentu. Untuk dapat mengetahui kondisi perekonomian suatu negara dapat dilihat dengan indikator Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Domestik Bruto (BPD) merupakan nilai tambah uang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu negara. Produk Domestik Bruto juga diartikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi.

Menurut Badan Pusat Statistika Produk Domestik Regional Bruto merupakan nilai tambah uang dihasilkan oleh seluruh unit usaha pada suatu daerah yaitu provinsi atau daerah kabupaten/kota. Suatu daerah yang melakukan kegiatan produksi, hasil dari

kegiatan tersebut merupakan pendapatan domestik atau regional. Kegiatan produksi membutuhkan peran dari penduduk sebagai modal tenaga kerja. Hal ini membuat pendapatan masyarakat juga dibantu akan kegiatan produksi.

2.2.3 Infrastruktur Jalan

Pengertian jalan diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang melingkupi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan sebagai lalu lintas, dimana itu berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Dalam Undang – Undang tersebut juga mengatur tentang pengelompokan jalan. Jalan berdasarkan peruntukannya dibagi menjadi jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan lagi sebagai berikut :

1) Jalan Nasional

Jalan nasional merupakan jalan yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, jalan strategis nasional, dan juga jalan tol.

2) Jalan Provinsi

Jalan provinsi merupakan jalan yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota, antar ibu kota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.

3) Jalan Kabupaten

Jalan kabupaten merupakan jalan yang menghubungkan antara ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan local, jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

4) Jalan Kota

Jalan Kota merupakan jalan menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota.

5) Jalan Desa

Jalan desa merupakan jalan yang menghubungkan kawasan antar pemukiman di dalam desa dan jalan lingkungan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Infrastruktur Jalan menjelaskan bahwa infrastruktur jalan merupakan salah satu dasar utama untuk kesejahteraan umum, sebagai prasarana dalam pelayanan umum serta pemanfaatan sumber daya ekonomi yang melalui pendekatan pengembangan wilayah supaya hubungan antar pusat kegiatan, keseimbangan juga pemerataan pembangunan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional dapat tercapai. Jalan juga memiliki peran sebagai prasarana atau akses dalam kegiatan distribusi barang dan jasa dalam perekonomian.

2.2.4 Industri

Pengertian industri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah atau memproduksi bahan baku dan/atau memanfaatkan potensi sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang lebih dinilai mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Menurut Badan Pusat Statistika, industri merupakan suatu unit atau kesatuan yang melakukan kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa, terletak pada suatu lokasi tertentu dan mempunyai catatan administrasi mengenai produksi dan struktur biaya serta ada satu orang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.

Berdasarkan pada banyaknya tenaga kerja yang bekerja, Badan Pusat Statistika mengklasifikasikan perusahaan industri pengolahan menjadi 4 golongan, seperti pada

tabel.

Tabel 2. 2 Klasifikasi Industri

No.	Klarifikasi Industri	Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja (orang)
1.	Industri Besar	100 orang atau lebih
2.	Industri Sedang	20 – 99 orang
3.	Industri Kecil	5 – 19 orang
4.	Industri Rumah Tangga	1 – 4 orang

Melihat tabel diatas, apabila semakin besar akan industri maka semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan. Hal ini berkaitan dengan industrialisasi mampu memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga, industri juga merupakan salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia supaya terlatih dan juga memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Kawasan industri memang seharusnya perlu diperluas. Perluasan kawasan industri akan menambah kesempatan kerja bagi masyarakat. Hal ini tentunya akan berkaitan dengan penambahan pendapatan masyarakat juga.

2.2.5 Jumlah Penduduk

Pengertian penduduk menurut Badan Pusat Statistika adalah semua individu yang bertempat atau berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih atau mereka yang bertempat atau berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Jumlah penduduk di Indonesia dapat diketahui melalui proses pendaftaran penduduk. Pendaftaran penduduk merupakan pencatatan biodata penduduk, pencatatan akan laporan peristiwa kependudukan, pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen tentang kependudukan yaitu berwujud kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Pendaftaran penduduk dilakukan oleh badan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dibawah Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

2.2.6 Hubungan Panjang Jalan Dengan Penerimaan Pajak Daerah

Penelitian tentang teori pertumbuhan baru (*new growth theory*) menjelaskan tentang pentingnya akan infrastruktur dalam mendorong peningkatan perekonomian. Infrastruktur merupakan suatu input yang dapat mempengaruhi output agregat. Pengertian yang dimaksud adalah apabila infrastuktur dapat terselenggara dengan baik maka akan mempengaruhi kegiatan produksi. Dalam hal ini dapat dikatakan telah terjadi eksternalitas positif karena infrastruktur yang ada tersebut mampu memberikan aksesibilitas atau kemudahan akses dalam kegiatan perekonomian sehingga kegiatan produksi menjadi produktif.

Kegiatan perekonomian yang mudah dikarenakan terdapatnya infrastruktur jalan yang memadai akan berdampak terhadap penerimaan pajak suatu daerah. Infrastruktur jalan yang baik akan menyebabkan kegiatan distribusi menjadi merata sehingga barang akan terjual sebagai pajak tidak langsung. Pengenaan pajak terhadap barang tersebut akan menjadi salah satu sumber pendapatan atau penerimaan suatu daerah.

Pengadaan infrastruktur yang baik dan memadai memiliki peranan penting dalam proses percepatan pembangunan serta peningkatan produktivitas yang lebih tinggi (Andriany & Mariatul, 2019). Terjadinya perubahan akan infrastruktur jalan yang dimana semula kurang baik menjadi baik banyak berdampak bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian. Dengan akses yang mudah, masyarakat mampu menghemat dalam biaya transportasi dan mampu memperluas kegiatan perekonomian. Semakin luas daerah yang dikunjungi untuk melakukan kegiatan akan menambah penerimaan pajak suatu daerah.

2.2.7 Hubungan Produk Domestik Regional Bruto Dengan Penerimaan Pajak Daerah

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian pada suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju kondisi yang lebih baik dalam

jangka waktu tertentu (Sukirno, 2019). Dalam mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Nurcholis Hanif dalam (Sarjono et al., 2018) menjelaskan bahwa jika Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah mengalami peningkatan maka terjadi peningkatan pada kemampuan suatu daerah dalam membayar pajak (*ability to pay*). Perekonomian yang tumbuh pada suatu daerah akan meningkatkan objek serta subjek pajak yang memiliki wajib pajak kepada pemerintah daerah. hal ini akan menyebabkan peningkatan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pajak daerah.

Kondisi suatu wilayah atau daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto. Kenaikan Produk Domestik Regional Bruto akan mempengaruhi terhadap penerimaan daerah. Apabila perolehan pendapatan masyarakat mengalami kenaikan maka berarti semakin tinggi juga kemampuan masyarakat dalam membayar pajak sehingga penerimaan pajak daerah akan meningkat. Penjabaran mengenai hubungan diatas sejalan dengan penelitian Miftahol dkk (2018) yang menyebutkan bahwa variabel independen jumlah PDRB mempengaruhi variabel penerimaan pajak reklame Malang Raya.

2.2.8 Hubungan Jumlah Industri Dengan Penerimaan Pajak Daerah

Industri merupakan salah satu sektor bidang perusahaan yang memiliki kegiatan produksi dan distribusi barang maupun jasa. Kawasan industri di Indonesia terbilang cukup besar dan luas, sebanyak 135 kawasan. Kawasan industri merupakan kawasan atau wilayah pemusatan akan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan adanya prasarana, sarana serta fasilitas lain yang disediakan dan dikelola Perusahaan Kawasan Industri.

Tersebar nya industri di Indonesia mampu memberikan dampak bagi perekonomian. Tenaga kerja sangat dibutuhkan industri dalam proses kegiatannya. Kesempatan kerja bagi tenaga kerja menjadi meningkat. Meningkatnya akan peluang kerja akan mengurangi fenomena pengangguran di Indonesia. Tingkat pengangguran yang semakin berkurang akan menambah tingkat pendapatan masyarakat.

Industri atau perusahaan dalam memperkenalkan usaha atau produk kepada masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu dari cara tersebut adalah dengan memasarkan melalui media reklame. Reklame merupakan salah satu cara meningkatkan daya tarik akan suatu produk atau layanan karena terdapat penyampaian informasi mengenai produk atau layanan. Pemasangan reklame di Indonesia dikenakan pajak reklame. Semakin banyak industri memasarkan dengan menggunakan reklame maka akan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Rofiah dan Khusaini (2017) dimana variabel independen jumlah industri berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak reklame.

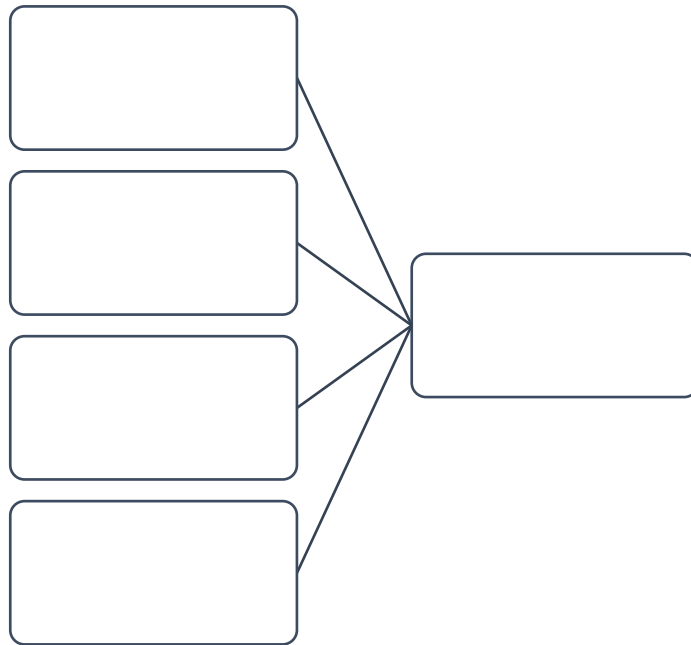
2.2.9 Hubungan Jumlah Penduduk Dengan Penerimaan Pajak Daerah

Jumlah penduduk merupakan faktor supaya pertumbuhan ekonomi menjadi meningkat. Dengan adanya pertumbuhan penduduk mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, yang disebabkan karena terjadi perluasan pasar sehingga mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian (Yunianto, 2021). Penduduk memiliki peran penting dalam mengoptimalkan semua kegiatan ekonomi. Salah satu peran masyarakat di dalamnya ialah pajak. Jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah memiliki peran yang aktif dalam menunjang penerimaan pajak daerah. Seperti yang diketahui, masyarakat merupakan wajib pajak. Maka dari itu dapat diasumsikan apabila jumlah penduduk meningkat maka akan meningkat pula penerimaan pajak daerah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis meneliti pengaruh dari variabel bebas (*independent variabel*) Infrastruktur Jalan, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Industri dan Jumlah Penduduk terhadap terikat (*dependen variabel*) yaitu Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2021. Berikut gambaran kerangka pemikiran :

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Berdasarkan penelitian terdahulu dan rumusan masalah yang ada maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Diduga panjang jalan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah
2. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah
3. Diduga jumlah industri berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah
4. Diduga jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Penelitian yang dilakukan adalah menggunakan data panel. Data panel merupakan gabungan antara *time series* dan *cross section*. Data *time series* merupakan sekumpulan observasi atau penelitian pada satu variabel dalam kurun waktu yang berbeda beda. Pada penelitian ini menggunakan kurun waktu antara 2014 – 2021. Data *cross section* merupakan jenis data yang dimana variabel variabel dikumpulkan pada suatu titik waktu tertentu. Objek penelitian ini adalah Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data pada Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah. Analisis pada penelitian ini diuji dengan Regresi Data Panel yang menggunakan Eviews 12 sebagai alat bantu dalam menganalisis secara ekonometrik.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif terdapat hubungan variabel terhadap obyek yang diteliti bersifat kausal atau hubungan sebab dan akibat, maka terdapat variabel independen dan variabel dependen (Sugiyono, 2013). Didalam penelitian ini Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai variabel dependen, sedangkan Panjang Jalan, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Industri dan Jumlah Penduduk sebagai variabel independen.

3.2.1 Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel dependen (terikat) merupakan suatu variabel yang dipengaruhi oleh adanya variabel independen (bebas) (Sugiyono, 2013). Variabel dependen yang digunakan adalah Penerimaan Pajak Daerah. Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah periode waktu 2014 – 2021 dengan satuan Ribu Rupiah.

3.2.2 Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel Independen (bebas) merupakan suatu variabel yang menjadi penyebab atau mempengaruhi variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2013). Pada penelitian ini menggunakan variabel independen (bebas) sebagai berikut :

- a) Panjang Jalan yang digunakan pada penelitian ini adalah Panjang Jalan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah menurut kondisi jalan pada tahun 2014 – 2021 dengan satuan kilometer.
- b) Pertumbuhan Ekonomi yang dimaksud adalah PDRB Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2014 – 2021 menggunakan satuan miliar rupiah.
- c) Jumlah Industri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Banyaknya Perusahaan Industri Manufaktur Skala Besar dan Sedang menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2014 – 2021 menggunakan satuan jumlah.
- d) Jumlah Penduduk pada penelitian ini menggunakan Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2014 – 2021 menggunakan satuan jiwa.

3.3 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan bantuan alat program Eviews 12 sebagai alat pengolahan data. Dalam penelitian ini, model penerimaan pajak Provinsi Jawa Tengah dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

Y = Penerimaan Pajak

β_0 = Konstanta

$\beta_1\beta_2\beta_3\beta_4$	= Koefisien Regresi
X_1	= Panjang Jalan (Km)
X_2	= PDRB (Miliar Rupiah)
X_3	= Jumlah Industri (Unit)
X_4	= Jumlah Penduduk (Jiwa)
ε	= <i>Terms of Error</i>
i	= Kabupaten/Kota
t	= Tahun

3.3.1 Uji Model

Langkah langkah dalam analisis regresi data panel adalah penentuan model estimasi. Terdapat tiga model estimasi yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Penentuan model estimasi akan disesuaikan berdasarkan data yang sudah tersedia dan reabilitas antar variabel. Pengujian model estimasi yang dilakukan berguna untuk memperoleh estimasi model yang paling tepat untuk digunakan.

3.3.1.1 Estimasi Model pada Data Panel

1. *Common Effect*

Model *common effect* menggabungkan antara data *cross section* serta *time series* dengan menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel (Widarjono, 2009). Metode *Ordinary Least Square* (OLS) atau teknik kuadrat terkecil dapat digunakan dalam mengestimasi model data panel.

2. *Fixed Effect*

Model regresi *Fixed Effect* merupakan model yang memiliki asumsi terdapat perbedaan intersep dalam sebuah persamaan. Model *Fixed Effect* menggunakan Teknik estimasi data panel dengan menggunakan variabel *dummy* untuk melihat adanya perbedaan intersep. Model ini juga memiliki asumsi bahwa koefisien regresi itu tetap antara subjek dan antar waktu.

Aturan mengestimasi model *Fixed Effect* dengan intersep yang berbeda yaitu dengan menggunakan metode teknik variabel *dummy* guna menjelaskan adanya perbedaan intersep atau biasa disebut teknik *Least Squares Dummy Variables* (LSDV).

3. *Random Effect*

Random effect mengestimasi pada data panel yang variabel residual diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar subjek. Model *random effect* ini digunakan dalam mengatasi kelemahan model *fixed effect* dengan variabel *dummy*. Hal ini dikarenakan model *fixed effect* terdapat konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan atau *degree of freedom* yang akan mengurangi efisiensi parameter.

3.3.1.2 Pemilihan Model Data Panel

1. Uji Chow

Uji Chow merupakan pengujian dalam menentukan model *Fixed Effect* atau *Common Effect* yang tepat digunakan untuk mengestimasi data panel. Hipotesis dalam Uji Chow sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model* merupakan model terbaik

H_a : *Fixed Effect Model* merupakan model terbaik

Penolakan akan hipotesis diatas dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan antara perhitungan F-statistik dengan F-tabel. Apabila hasil F hitung lebih besar ($>$) dari F tabel maka H_0 ditolak yaitu model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*. Sedangkan, bila F hitung lebih kecil ($<$) dari F tabel maka gagal menolak H_0 sehingga model yang digunakan adalah *Common Effect Model*.

1. Uji Hausmant

Setelah dilakukan Uji Chow dan memperoleh model *Fixed Effect* yang tepat untuk digunakan, selanjutnya adalah menguji antara model *Fixed Effect* atau model *Random Effect* yang paling tepat. Pengujian ini disebut dengan Uji Hausman. Hipotesis dalam Uji Hausman sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect Model* merupakan model terbaik

H_a : *Fixed Effect Model* merupakan model terbaik

Apabila hasil estimasi menunjukkan nilai probabilitas *cross section* kurang dari ($<$) α 1%, 5% atau 10% maka menolak H_0 . Hal tersebut berarti bahwa terdapat perbedaan antar objek dalam suatu periode sehingga metode yang paling tepat untuk digunakan adalah *fixed effect*. Apabila hasil estimasi menunjukkan probabilitas *cross section* lebih dari ($>$) α 1%, 5% atau 10% maka gagal menolak H_0 atau metode yang tepat digunakan adalah *random effect*.

2. Uji Langrange Multiplier (LM)

Uji Langrange Multiplier merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui model terbaik antara *Random Effect Model* atau *Common Effect Model* yang akan digunakan.

Hipotesis dalam Uji Langrange Multiplier sebagai berikut :

H_0 : *Common effect model* merupakan model terbaik

H_a : *Random effect model* merupakan model terbaik

Dalam Uji Langrange Multiplier, yang perlu dilihat adalah nilai pada Breusch-Pagan. Apabila nilai akan Breusch-Pagan kurang dari nilai kritis ($\alpha = 0.05$) maka akan berarti menolak H_0 dimana *random effect model* merupakan model yang baik untuk digunakan. Sebaliknya, jikalau nilai Breusch-Pagan lebih dari nilai kritis ($\alpha = 0.05$) maka berarti gagal menolak H_0 yang dimana model yang baik untuk digunakan dalam penelitian adalah *common effect model*.

3.4 Pengujian Hipotesis

Uji statistik pada penelitian ini menggunakan Uji Koefisien Determinasi (Uji- R^2), Uji Koefisien Regresi bersama sama (Uji F) dan Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji T)

3.4.1 Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) diperlukan untuk mengukur atau menghitung kemampuan suatu model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai dari koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu. Apabila hasil nilai R^2 kecil maka kemampuan variabel independent sangat terbatas dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Jika hasil nilai R^2 mendekati angka satu maka variabel variabel independent mampu menjelaskan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel independen.

3.4.2 Koefisien Regresi Bersama-sama (Uji F)

Uji statistik F digunakan dalam menguji jika variabel independen secara simultan mempengaruhi secara signifikan atau tidak signifikan dengan variabel dependen.

1. $H_0 : \beta_i = 0$ artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen secara simultan dengan variabel dependen.
2. $H_1 : \beta_i \neq 0$ artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen secara simultan dengan variabel dependen.

3.4.3 Koefisien Regresi Parsial (Uji T)

Uji statistik t dilakukan untuk membuktikan pengaruh satu variabel independen secara individu untuk menerangkan variasi variabel dependen. Interpretasi dari uji t adalah sebagai berikut :

1. $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis ditolak).
2. $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, maka variabel independent secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (hipotesis diterima).

BAB IV HASIL ANALISIS

4.1 Analisis Deskriptif Data

Data yang disajikan dengan menggunakan analisis data panel dengan menelaah pengaruh Panjang Jalan, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Industri dan Jumlah Penduduk terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan kurun waktu 2014-2021. Data dalam penelitian ini menggunakan data *time series* dengan waktu tahun 2014 – 2021 dan data *cross section* pada 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Panjang Jalan, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Industri dan Jumlah Penduduk merupakan variabel independen dan Penerimaan Pajak Daerah merupakan variabel dependen. Pengolahan data menggunakan analisis data panel dengan bantuan Eviews 12 sebagai alat pengolah data. Dibawah merupakan deskriptif nilai statistik rata-rata atau *mean*, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi.

Tabel 4. 1 Deskriptif Data Penelitian

	Pajak (ribu rupiah)	PJ (kilometer)	Industri (satuan)	PDRB (miliar rupiah)	JP (jiwa)
Mean	126649060.5	442.4436	127.0786	22696.39	1029758
Maksimum	1974540653	1547.000	650.0000	144705.0	11554040
Minimum	14138700	23.00000	13.00000	266.0000	12112.0
Std. Deviasi	212831993.1	228.1912	106.8818	22205.93	761520.8

4.2 Regresi Data Panel

Metode regresi data panel terdapat 3 model yaitu, *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Untuk dapat mengetahui hasil estimasi terbaik diperlukan pengujian menggunakan uji data panel dengan menggunakan uji *chow* dan uji *hausman*.

4.3 Pemilihan Model

Pemilihan model regresi yang digunakan dalam penelitian adalah regresi data panel. Regresi data panel terdapat 3 metode yang dapat digunakan yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Pemilihan model yang terbaik dengan penelitian ini dilakukan dengan uji Chow dan Uji Hausman.

4.3.1 Uji Chow

Uji Chow merupakan metode perhitungan untuk mempertimbangkan pemilihan model terbaik antara *common effect model* atau *fixed effect model*, berikut hasil uji Chow

Tabel 4. 2 Hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	27.225632	(34,241)	0.0000
Cross-section Chi Square	441.591686	34	0.0000

Sumber: Data diolah menggunakan eviews 12

Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas Cross-section Chi-Square sebesar $0.0000 < \alpha 0.05\%$ maka menolak H_0 yang berarti bahwa model terbaik yang digunakan adalah model *fixed effect model*.

4.3.2 Uji Hausmant

Uji hausmant merupakan metode perhitungan untuk mempertimbangkan pemilihan model terbaik antara *fixed effect model* atau *random effect model*, berikut hasil uji hausmant.

Tabel 4. 3 Hasil Uji Hausmant

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob
Cross-section random	30.045094	4	0.0000

Sumber: Data diolah menggunakan eviews 12

Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa nilai probabilitas *Cross-section* random sebesar $0.0000 < \alpha 0.05\%$ maka menerima H_0 yang berarti bahwa model terbaik yang digunakan adalah model *fixed effect model*.

4.3.3 Uji LM

Uji LM yaitu uji yang dilakukan guna mengetahui model yang terbaik antara model *common effect* dan model *random effect*, berikut hasil uji LM:

Tabel 4. 4 Hasil Uji LM

	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	361.7463	0.000258	361.7465
	(0.0000)	(0.9872)	(0.0000)

Sumber: Data diolah menggunakan eviews 12

Berdasarkan pengolahan uji LM diperoleh nilai Breusch-Pagan 0.0000 dimana lebih kecil $< \alpha 0.05\%$ sehingga menolak H_0 artinya *random effect* merupakan model terbaik.

4.4 Model Regresi Terbaik

Hasil dari pengujian yang sudah dilakukan diatas maka diketahui bahwa model yang terbaik untuk digunakan dalam melakukan analisis yaitu model regresi *fixed effect model*.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Fixed Effect Model

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.48E+08	23783342	6.218801	0.000
PJ	-247714.9	30296.89	-8.176248	0.0000
INDUSTRI	540027.8	140507.9	3.843398	0.0002
PDRB	1271.307	348.3760	3.649240	0.0003
JP	-8.871012	7.233751	-1.226336	0.2213
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.908623	Mean dependent var	1.27E+08	
Adjusted R-squared	0.894215	S.D. dependent var	2.13E+08	
S.E. of regression	69222665	Akaike info criterion	39.07213	
Sum squared resid	1.1E+18	Schwarz criterion	39.57841	
Log likelihood	-5431.099	Hannan-Quinn criter.	39.27520	
F-statistic	63.06402	Durbin-Watson stat	1.2123271	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan tabel hasil olah data di atas digunakan untuk mengevaluasi pengaruh antara variabel independen Panjang Jalan, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Industri dan Jumlah Penduduk terhadap variabel dependen Penerimaan Pajak Daerah. Evaluasi yang dimaksud adalah koefisien determinasi (R^2), uji F-statistik, dan uji t statistik.

4.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi (R^2) digunakan mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen Panjang Jalan, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Industri dan Jumlah dapat menjelaskan perubahan atau variasi dari variabel dependen Penerimaan Pajak

Daerah.

Dapat dilihat pada tabel nilai adjusted R-square sebesar 0.894215 yang berarti bahwa pada penelitian ini variabel independen Panjang Jalan, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Industri dan Jumlah Penduduk mampu menjelaskan variabel Penerimaan Pajak Daerah sebesar 89.42% dan 10.58% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk pada penelitian ini.

4.4.4 Uji Analisis F statistik

Uji analisis F statistik digunakan untuk menguji pengaruh simultan koefisien variabel regresi secara signifikan. Dapat dilihat dari tabel hasil regresi diatas nilai *P-value* sebesar $0.000000 < \alpha 0.05\%$ maka menolak H_0 . Kesimpulannya adalah variabel independent Panjang Jalan, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Industri dan Jumlah Penduduk secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen Penerimaan Pajak Daerah.

4.4.5 Uji Analisis T statistik

Uji analisis T statistik atau distribusi T statistik digunakan untuk menguji apakah masing-masing variabel berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut hasil dari uji t :

- a. Variabel Panjang Jalan terhadap Penerimaan Pajak Daerah

$H_0 : \beta_0 = 0$ Panjang Jalan tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah tahun 2014 – 2021

$H_a : \beta_1 < 0$ Panjang Jalan berpengaruh negatif terhadap Penerimaan Pajak Daerah tahun 2014 – 2021

Variabel infrastruktur jalan memiliki nilai koefisien sebesar -247714.9 serta memiliki nilai probabilitas sebesar $0.0000 < \alpha 0.05\%$ yang dimana mempunyai arti menolak H_0 yaitu bahwa variabel Panjang Jalan berpengaruh negatif terhadap variabel Penerimaan Pajak Daerah tahun 2014 – 2021.

b. Variabel PDRB terhadap Penerimaan Pajak Daerah

$H_0 : \beta_0 = 0$ PDRB tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah tahun 2014 – 2021.

$H_a : \beta_1 > 0$ PDRB berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Daerah tahun 2014 – 2021.

Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai koefisien sebesar 1271.307 serta memiliki nilai probabilitas sebesar $0.0003 < \alpha 0.05\%$ maka menolak H_0 berarti bahwa variabel PDRB berpengaruh positif terhadap variabel Penerimaan Pajak Daerah tahun 2014 – 2021.

c. Variabel Jumlah Industri

$H_0 : \beta_0 = 0$ Jumlah Industri tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah tahun 2014 – 2021.

$H_a : \beta_1 > 0$ Jumlah Industri berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Daerah tahun 2014 – 2021.

Variabel Jumlah Industri memiliki nilai probabilitas sebesar $0.0002 < \alpha 0.05\%$ maka H_0 berarti bahwa variabel Jumlah Industri memiliki pengaruh terhadap variabel Penerimaan Pajak Daerah. Nilai koefisien variabel Jumlah Industri sebesar 540027.8 maka Jumlah Industri berpengaruh positif terhadap variabel Penerimaan Pajak Daerah tahun 2014 – 2021.

d. Variabel Jumlah Penduduk

$H_0 : \beta_0 = 0$ Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah 2014 – 2021.

$H_a : \beta_1 < 0$ Jumlah Penduduk berpengaruh negatif terhadap Penerimaan Pajak Daerah 2014 – 2021.

Variabel Jumlah Penduduk menghasilkan probabilitas sebesar $0.2213 > \alpha 0.05\%$ maka berarti gagal menolak H_0 . Dijelaskan bahwa variabel Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2014 -

2021.

4.5 Analisis Ekonomi

4.5.3 Analisis Pengaruh Panjang Jalan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa nilai probabilitas panjang jalan sebesar 0.0000 serta nilai koefisien sebesar -247714.9. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel panjang jalan berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini berbanding terbalik dengan teori yang ada.

Asumsi akan panjang jalan yaitu apabila panjang jalan itu baik maka mobilitas kegiatan perekonomian akan meningkat. Dengan adanya mobilitas kegiatan perekonomian berarti terjadi adanya transaksi ekonomi yang dimana akan meningkatkan penerimaan pajak. Tetapi melihat dari hasil diatas, dapat dikatakan bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tidak berkaitan langsung dengan panjang jalan, karena pembangunan panjang jalan yang dilakukan oleh pemerintah itu digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan sosial. Pemerintah melakukan pembangunan jalan bermaksud guna memudahkan akses mobilitas masyarakat. Kemudahan akses jalan yang diberikan oleh pemerintah digunakan masyarakat untuk berkegiatan sosial. Kegiatan sosial yang dilakukan oleh masyarakat ini merupakan tujuan utama. Kegiatan ekonomi memungkinkan dapat terjadi tetapi hal tersebut bukanlah menjadi tujuan utama masyarakat dalam melakukan mobilitas. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Andriany & Mariatul, 2019) yang menjelaskan bahwa ketersediaan infrastruktur berpengaruh positif dengan *tax capacity* pajak daerah.

4.5.4 Analisis Pengaruh PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa nilai probabilitas PDRB sebesar 0.0003 dan nilai koefisien sebesar 1271.307. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh positif terhadap variabel penerimaan pajak daerah. Hal ini dapat dijelaskan bahwa peningkatan PDRB, terutama sektor perdagangan, hotel dan pariwisata (hiburan). Kegiatan ekonomi tersebut mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lumy et al., 2018) yang menjelaskan variabel PDRB memiliki pengaruh positif terhadap variabel Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

4.5.5 Analisis Pengaruh Jumlah Industri Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 0.0002 serta nilai koefisien sebesar 540027.8. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa variabel Jumlah Industri berpengaruh positif terhadap variabel Penerimaan Pajak Daerah. Hal ini dapat dibuktikan apabila jumlah industri semakin banyak maka penerimaan pajak juga akan meningkat. Setiap industri yang memiliki tempat atau kawasan akan dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu juga apabila suatu industri akan mempromosikan suatu produk maka salah satu caranya dengan menggunakan reklame. Penggunaan reklame dalam menarik konsumen akan dikenakan Pajak Reklame. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Efitriana & Khoirudin, 2021) yang menyimpulkan bahwa variabel jumlah industri memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak reklame Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4.5.6 Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil dari penelitian diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 0.2213. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa variabel Jumlah Penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Penerimaan Pajak Daerah. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Aji & Sbm, 2021) karena pada penelitian tersebut menjelaskan kepadatan penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan. Hal ini mungkin dikarenakan peningkatan jumlah penduduk tidak mendorong peningkatan penerimaan pajak restoran dan hiburan di daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan akan hasil estimasi penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel panjang jalan memiliki pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 – 2021.
2. Variabel PDRB memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 – 2021.
3. Variabel jumlah industri memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 – 2021.
4. Variabel jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 – 2021.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian ini, penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah salah satunya dengan menambah jumlah industri. Meskipun penambahan jumlah industri merupakan salah satu faktor peningkatan penerimaan pajak daerah tetapi perlu adanya pengawasan dari pemerintah. Pengawasan tersebut berupa adanya penataan kawasan industri. Hal ini sangat perlu diperhatikan pada saat akan menambah jumlah industri pada suatu daerah dengan melihat tempat yang strategis.
2. Perlu dilakukan inovasi pengeluaran produk domestik regional untuk menunjang pertambahan pajak daerah. Selain itu juga dapat menggunakan analisis SWOT untuk keberlangsungan pengeluaran produk kedepannya.
3. Pemerintah perlu melakukan adanya evaluasi pembangunan infrastruktur jalan. Lebih bisa mengembangkan daerah supaya tidak hanya sebagai jalan penghubung untuk

kegiatan sosial saja tetapi bisa dijadikan tempat untuk melakukan kegiatan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, F. B., & Sbm, N. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Daerah Kota Semarang. *Diponegoro Journal of Economics*, 10(1), 1–12.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dje>
- Andriany, D., & Mariatul, R. (2019). Analisis Hubungan antara Infrastruktur Jalan dan Tax Capacity : Studi Kasus Indonesia An Analysis of Relationship between Road Infrastructure and Tax Capacity in Indonesia Pendahuluan. *Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 33–50.
- Aprili, T., Desanti, N., Zain, D., & Yuardani, A. M. (2019). Upaya Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah (Bpprd) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran Di Kabupaten Kubu Raya. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 11(2), 1–16. <https://doi.org/10.33701/jtp.v11i2.719>
- Efitriana, D., & Khoirudin, R. (2021). Analisis Penerimaan Pajak di DIY dan Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Ilmiah Simantek*, 5(1), 99–106.
- Fatah, A. A. (2015). *Pengaruh Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri Terhadap Penerimaan Pajak Reklame dan Efeknya pada Penerimaan Pajak Daerah*.
- Hidayah, F., Azhar, Z., & Putri, D. Z. (2018). Analisis Kausalitas Pertumbuhan Ekonomi, Infrastruktur dan Penerimaan Pajak di Provinsi Sumatera Barat. *EcoGen*, 1. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/pek/article/view/5029/2764>
- Iskandar, I., Sugiarto, & Hermawan, W. (2021). Causality Relationship Between Infrastructure, Taxes and GRDP Per Capita in Aceh. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 580–588.
- Lumy, D. G., Kindangen, P., Engka, D. S. M., Ratulangi, U. S., Penduduk, J., & Daerah, P. (2018). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA |Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah

Vol.19 No.2 (2018). *Akuntansi Dan Pembangunan*, 19(2), 1–16.

- Miftahol, A., Rofik, M., & Andrianingsih, V. (2018). *Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Industri dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penerimaan Pajak Daerah*. 1(1), 175–182.
- Ng, C. P., Law, T. H., Jakarni, F. M., & Kulanthayan, S. (2019). Road Infrastructure Development and Economic Growth. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 512(1), 0–10. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/512/1/012045>
- Rofiah, A. F., & Khusaini, M. (2017). Analisis Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri Terhadap Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2006-2015 (Studi Pada Malang Raya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Branijaya*, 2015.
- S, R. Y. J., Pajak, P. P., Kabupaten, P., Berdasarkan, K., Tahun, U. N., Yuniardita, R., Subangkit, J., Anggaraini, R. A. R., Bagus, I., Ana, O., Hukum, B., Negara, T., Hukum, F., Unej, U. J., Kalimantan, J., Tahun, U. N., Cara, T., S, R. Y. J., & Pajak, P. P. (2009). Penerapan Penarikan Pajak Oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Berdasarkan Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan. *Jurnal*, 1–13.
- Sarjono, N., Anwar, C., & Darmansyah. (2018). Analisa Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Dengan Tingkat Kemiskinan Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, Vol. 6(12), 113–127.
http://eprints.ummi.ac.id/224/2/ANALISA_PENGARUH_PERTUMBUHAN_EKONOMI_TERHADAP_PENERIMAAN_PAJAK_DAERAH_DENGAN_TINGKAT_KEMISKINAN_SEBAGAI_VARIABEL_MODERASI.pdf
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD*. Alfabeta.
https://elibrary.stikesghsby.ac.id/index.php?p=show_detail&id=1879&keywords
=

Sukirno, S. (2019). *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (Edisi keti). PT. Rajawali Pers.

<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1139124#>

Widarjono, A. (2009). *Ekonometrika*. Ekonisiaa.

https://library.fbe.uui.ac.id/index.php?p=show_detail&id=5789&keywords=ekonometrika

Yunianto, D. (2021). Analisis pertumbuhan dan kepadatan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. *Forum Ekonomi*, 23(4), 688–699.

<https://doi.org/10.30872/jfor.v23i4.10233>

LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Hasil Pengujian

1. Uji CEM

Dependent Variable: PAJAK
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/25/23 Time: 10:55
 Sample: 2014 2021
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 280

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-91594239	20800201	-4.403527	0.0000
PJ	48762.85	40721.97	1.197458	0.2322
INDUSTRI	991516.1	85468.52	11.60095	0.0000
PDRB	4068.408	426.6984	9.534623	0.0000
JP	-21.04390	12.13710	-1.733850	0.0841
R-squared	0.557649	Mean dependent var	1.27E+08	
Adjusted R-squared	0.551215	S.D. dependent var	2.13E+08	
S.E. of regression	1.43E+08	Akaike info criterion	40.40639	
Sum squared resid	5.59E+18	Schwarz criterion	40.47130	
Log likelihood	-5651.895	Hannan-Quinn criter.	40.43242	
F-statistic	86.66950	Durbin-Watson stat	0.549728	
Prob(F-statistic)	0.000000			

2. Uji FEM

Dependent Variable: PAJAK
 Method: Panel Least Squares
 Date: 07/25/23 Time: 10:58
 Sample: 2014 2021
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 280

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.48E+08	23783342	6.218801	0.0000
PJ	-247714.9	30296.89	-8.176248	0.0000
INDUSTRI	540027.8	140507.9	3.843398	0.0002
PDRB	1271.307	348.3760	3.649240	0.0003
JP	-8.871012	7.233751	-1.226336	0.2213

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.908623	Mean dependent var	1.27E+08
Adjusted R-squared	0.894215	S.D. dependent var	2.13E+08
S.E. of regression	69222665	Akaike info criterion	39.07213
Sum squared resid	1.15E+18	Schwarz criterion	39.57841
Log likelihood	-5431.099	Hannan-Quinn criter.	39.27520
F-statistic	63.06402	Durbin-Watson stat	1.213271
Prob(F-statistic)	0.000000		

3. Uji REM

Dependent Variable: PAJAK
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 07/25/23 Time: 10:58
 Sample: 2014 2021
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 280
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	84802983	27992917	3.029444	0.0027
PJ	-201177.1	28996.48	-6.937984	0.0000
INDUSTRI	767158.0	114477.1	6.701407	0.0000
PDRB	1830.930	330.2936	5.543339	0.0000
JP	-7.952583	7.114112	-1.117860	0.2646

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		1.12E+08	0.7246
Idiosyncratic random		69222665	0.2754

Weighted Statistics			
R-squared	0.306878	Mean dependent var	26972200
Adjusted R-squared	0.296796	S.D. dependent var	88120732
S.E. of regression	73895624	Sum squared resid	1.50E+18
F-statistic	30.43888	Durbin-Watson stat	1.065849
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.366307	Mean dependent var	1.27E+08
Sum squared resid	8.01E+18	Durbin-Watson stat	0.199852

4. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
 Equation: Untitled
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	27.225632	(34,241)	0.0000
Cross-section Chi-square	441.591686	34	0.0000

5. Uji Hausmant

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	42.381606	4	0.0000

6. Uji LM

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	361.7463 (0.0000)	0.000258 (0.9872)	361.7465 (0.0000)